

PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE BERBASIS MASYARAKAT DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG

Amal dan Ichsan Invani Baharuddin

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar
Jl. Daeng Tata Raya, Kampus UNM Parangtambung, Makassar
Email: amalarfan@rocketmail.com

Abstract. Perception and Community Participation in Community Based Mangrove Forest Management in Sub Suppa Pinrang The aim in this study (1) to know the perception, on the management of mangrove forests (2) to know participation the management of mangrove forests.. The results obtained that the management of mangrove forest resources over the years not many involve coastal communities in particular at the planning stage as well as to the maintenance stage and communities want in order established groups of farmers / fishermen. Mentoring in the management of mangrove forest resources and determination of management zones whether as a conservation area rehabilitation cultivation thus mangrove forest area and resources can be maintained and sustainably. Damage to mangrove forests Pinrang seashores is generally disebabkan by conversion of mangrove forests become and buffeted by big waves. Communities along the coast Kacamatan Suppa,actively will participate in, the management of mangrove forest areas ranging from the planning, supervision, until the stage of maintenance / preservation of mangrove forest resources.

Abstrak. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini (1) mengetahui persepsi terhadap pengelolaan hutan mangrove (2) mengetahui partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan mangrove. Hasil yang diperoleh bahwa pengelolaan sumberdaya hutan mangrove selama ini belum banyak melibatkan masyarakat pesisir khususnya pada tahap perencanaan maupun sampai tahap pemeliharaan dan masyarakat menginginkan agar dibentuk kelompok-kelompok tani/nelayan. Pendampingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan mangrove dan penentuan zona-zona pengelolaan apakah sebagai kawasan konservasi, rehabilitasi, budidaya sehingga kawasan hutan mangrove dan sumberdayanya dapat terjaga dan lestari. Kerusakan hutan mangrove dipesisir pantai Kabupaten Pinrang adalah umumnya disebabkan oleh konversi hutan mangrove menjadi lahan pertambakan dan diterjang oleh ombak yang besar. Masyarakat di sepanjang pesisir pantai Kacamatan Suppa secara aktif akan berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove mulai dari tahap perencanaan pengawasan, sampai pada tahap pemeliharaan/pelestarian sumberdaya hutan mangrove.

Kata Kunci: Persepsi, Partisipasi Masyarakat, Hutan Mangrove

Pengelolaan hutan mangrove merupakan suatu usaha yang sangat kompleks untuk dilaksanakan, karena kegiatan tersebut sangat membutuhkan sifat akomodatif terhadap segenap pihak baik yang berada di sekitar kawasan maupun di luar kawasan.Pada dasarnya kegiatan ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan dari berbagai kepentingan. Namun demikian, sifat akomodatif ini akan lebih dirasakan manfaatnya

bilamana keberpihakan kepada masyarakat yang sangat rentan terhadap sumberdaya mangrove, diberikan porsi yang lebih besar.

Salah satu strategi penting yang saat ini sedang banyak dibicarakan orang dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam, termasuk ekosistem hutan mangrove adalah pengelolaan berbasis masyarakat lokal.Rahardjo (1996) mengemukakan bahwa pengelolaan berbasis

masyarakat mengandung arti keterlibatan langsung masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam di suatu kawasan. Mengelola disini mengandung arti masyarakat memikirkan, memformulasikan, merencanakan, mengimplementasikan, memonitor dan mengevaluasi sesuatu yang menjadi kebutuhannya, baik dalam hal perlindungan, pemanfaatan hasil dan rehabilitasi hutan mangrove.

Pengelolaan hutan mangrove tidak boleh mengesampingkan masyarakat setempat, namun membuka akses kepada masyarakat lokal terhadap distribusi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terbukanya akses ini akan membuat masyarakat menyadari arti pentingnya pengelolaan sumberdaya dan pada gilirannya akan menjamin kelestarian sumberdaya alam tersebut. Aspek sosial ekonomi diwujudkan dalam bentuk pengelolaan multiguna (Parawansa, 2007).

Pengelolaan multiguna akan membawa jangkauan kegiatan yang beragam sehingga membuka pilihan yang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk berperan serta dalam pengelolaan hutan mangrove (Dahuri *et al.*, 2001). Selanjutnya Soetrisno (1995) mengatakan bahwa peranserta masyarakat merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan masyarakat dalam merencanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai

Campbell (1997) dalam Rahardjo dan Pradan (2000), mempunyai pemikiran lain yaitu berbasis masyarakat adalah lebih pada proses perubahan sikap dan orientasi, mekanisme institusional dan administratif dan metoda manajemen dari pengelolaan sumberdaya hutan. Tahapan yang diusulkan adalah 20 (dua puluh) langkah pergeseran yang diperlukan dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat (kehutanan masyarakat), yaitu:

Tabel Pergeseran Konseptual yang di perlukan :

No	Dari	Menuju
A	Sikap dan Orientasi	
1	Pengendalian	Dukungan/fasilitas
2	Penerima manfaat	Mitra
3	Pengguna	Pengelola
4	Pembuatan keputusan unilateral	Partisipatif
5	Orientasi penerimaan	Orientasi sumberdaya

No	Dari	Menuju
6	Keuntungan nasional	Orientasi keadilan lokal
7	Diarahkan oleh rencana	Proses belajar/evolusi
B	Institusional dan Administratif	
8	Sentralisasi	Desentralisasi
9	Manajemen (perencanaan, pelaksanaan, monitoring) oleh Pemerintah	Kemitraan
10	Top down	Partisipatif/negosiatif
11	Orientasi target	Orientasi proses
12	Anggaran kaku untuk rencana kerja besar	Anggaran yang fleksibel dengan rencana mikro
13	Aturan-aturan untuk menghukum	Penyelesaian konflik
C	Metode Manajemen	
14	Kaku	Fleksibel
15	Tujuan tunggal	Tujuan ganda/beragam
16	Keseragaman	Keanekaragaman
17	Produk tunggal	Produk beragam
18	Menu manajemen yang tetap dengan aturan silvikultur	Beragam pilihan silvikultur untuk spesifik lokasi
19	Tanaman	Regenerasi alam
20	Tenaga kerja/buruh/pengumpul	Manager/pelaksanaan/pemasar

Di Sulawesi Selatan pengelolaan hutan mangrove masih sering mengalami kendala. Hal ini disebabkan karena kurangnya pelibatan masyarakat lokal. Hasil penelitian di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan yang dilakukan Amal (2008) tentang model partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan mangrove bahwa masyarakat menginginkan mereka dilibatkan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelestarian, karena merekalah yang tahu persis kondisinya tapi kenyataannya mereka kadang tidak dilibatkan, sehingga program yang direncanakan oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain menemui kegagalan.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka penelitian tentang persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang perlu untuk dilaksanakan

METODE

Penelitian ini adalah studi kasus dan bersifat deskriptif interpretative. Dalam

penelitian ini akan dideskripsikan tentang model, keinginan dan sikap masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Interpretasi dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, berupa tingkat pengetahuan masyarakat, tingkat dukungan masyarakat, kepentingan masyarakat terakomodasi dalam program pengelolaan sumberdaya hutan mangrove, persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan mangrove.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer di kumpulkan langsung dari informan dan responden melalui wawancara langsung dan catatan lapangan. Data sekunder diperoleh dengan melalui pengutipan data dari hasil penelitian, buku, laporan yang ada dan memiliki relevansi dengan penelitian lain.

Populasi dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah masyarakat usia 20 – 60 tahun yang bermukim di pesisir pantai Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik *Purposive Random Sampling*, yaitu hanya warga masyarakat yang telah merasakan keberadaan hutan mangrove atau yang telah bermukim disekitar kawasan hutan mangrove minimal 5 (lima) tahun. Sampel sebanyak 10 – 15 % dari populasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Dalam hal ini data yang diperoleh dari lapangan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan kuesioner, kemudian diolah dan disusun menjadi tabel frekuensi. Selanjutnya digunakan untuk menjelaskan suatu gejala dan menarik kesimpulan yang logis.

Untuk menjawab sejauh mana kepentingan masyarakat yang melekat pada program rehabilitasi hutan mangrove yang akan dilaksanakan, diukur dengan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hutan mangrove dan juga melalui sikap masyarakat. Hal tersebut dimaksud untuk melihat sejauh mana tingkat kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam program pengelolaan sumberdaya hutan mangrove yang akan dilaksanakan. Untuk mengetahui model masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya hutan mangrove yang akan dilakukan dengan melalui wawancara secara mendalam (*depth interview*)

Sementara untuk mengetahui perencanaan program pengelolaan sumberdaya hutan mangrove dari masyarakat digunakan teknik pendekatan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Metode PRA merupakan metode dan pendekatan mengenai kondisi dan kehidupan pedesaan dari dengan dan oleh masyarakat pedesaan sendiri. Kegiatan meliputi kegiatan menganalisis, merencanakan dan bertindak terhadap pengelolaan sumberdaya hutan tanaman mangrove, juga merupakan metode pendekatan dalam proses peningkatan partisipasi masyarakat, yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pengelolaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Kecamatan Suppa

Kawasan kajian ini terletak di mukim Suppa, Daerah Pinrang Negeri Sulawesi Selatan, Indonesia. Ini terletak pada 3°54'39" - 4°02'37.02" lintang selatan - 119°33'14.21" - 119°41'32.83" bujur timur. Kawasan Kecamatan Suppa memiliki batas-bata administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Lanrisang dan Mattirobulu
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kota Pare-Pare
- c. Sebelah Selatan : Selat makassar dan teluk Parepare
- d. Sebelah Barat : Selat Makassar

Hutan mangrove di pantai Suppa tersebar ke daerah teluk Pare-Pare. Mangrove juga banyak ditemukan di sekitar tambak. Rata-rata ketebalan mangrove di sepanjang pesisir pantai Suppa adalah sekitar antara 2 - 5 ind m -2. Spesies bakau yang banyak ditemukan adalah *Rhizophora apiculata*, *Rhizophora*, *Avicennia alba* dan *Sonneratia alba*. Ada juga ditemukan beberapa spesies bakau seperti *Sonneratia caseolaris*, *Ceriops tagal*, *Xylocarpus granatum*, *Nypa fructicans* (Bappeda Kabupaten Pinrang, 2012)

Sumber kehidupan penduduk di kawasan pesisir Kabupaten Pinrang berdasarkan sektor pekerjaan dapat dikategorikan sebagai petani, nelayan, petambak, pedagang, pegawai dan sebagainya. Berdasarkan data statistik Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang diperoleh bahwa sebagian besar (65.95%) penduduk yang

mendiami kawasan pesisir bersumber mata pencarian sebagai nelayan dan petambak.

Sektor perikanan merupakan salah satu usaha produksi ekonomi terbesar. Bisnis ekonomi perikanan melingkupi usaha eksploitasi sumber perairan (laut dan darat) secara langsung (nelayan) Di daerah pesisir di Kecamatan Suppa, jumlah penduduk yang melakukan kegiatan nelayan cukup banyak. Pola bisnis yang ada di Kabupaten Pinrang dilihat dari skala produksi hasil-hasil pertanian pada umumnya lebih bersifat memenuhi kebutuhan pasar lokal di mana orientasinya lebih terpusat ke daerah. Khusus bisnis hasil perikanan baik perikanan tangkap maupun pemeliharaan ikan dan udang di tambak, belum dikelola secara tepat. Pada umumnya hasil perikanan dijualbelikan dengan cara tradisional. Masih sangat langka pengelolaan hasil perikanan melalui lembaga ekonomi seperti koperasi (Laporan Akhir Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Kabupaten Pinrang Tahun 2009 - 2029, 2009)

Karakteristik Responden

Secara umum umur responden berkisar antara 20 – 60 tahun. Responden yang terbesar berada pada kelompok umur 45 – 49 tahun dan

50 – 60 tahun yaitu masing-masing sebesar 28 %. Pada kelompok umur inilah yang banyak memberikan masukan tentang persepsi dan partisipasi masyarakat di pesisir Kecamatan Suppa pada pengelolaan sumberdaya hutan mangrove. Tingkat pendidikan responden yang ada di lokasi penelitian adalah bervariasi mulai dari tidak tamat SD sampai SLTA, dengan status pendidikan yang pernah dilalui oleh responden yang terbanyak adalah hanya tamat SLTP yaitu sebesar 60 % atau sekitar 15 orang. Jenis pekerjaan yang banyak digeluti oleh responden adalah nelayan dan petambak. Oleh karena pekerjaan tersebut ada di kawasan pesisir maka dapat dikatakan bahwa aktivitas mereka akan berpengaruh terhadap pengelolaan sumberdaya hutan mangrove.

Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan masyarakat merupakan faktor pendukung yang sangat menunjang dalam pengelolaan sumberdaya hutan mangrove. Pengetahuan masyarakat tentang hutan mangrove disajikan pada table di bawah ini :

Tabel 1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat

No	Tingkat Pengetahuan masyarakat tentang...	Jawaban	F	%
1	Jenis-Jenis mangrove	Ya	25	100
		Tidak	0	0
		Ragu-Ragu	0	0
2	Sumberdaya yang ada di hutan mangrove	Ya	25	100
		Tidak	0	0
		Ragu-Ragu	0	0
3	Jenis-Jenis Sumberdaya Hutan Mangrove yang Bernilai Ekonomis	Ya	25	100
		Tidak	0	0
		Ragu-Ragu	0	0
4	Dampak dari Kerusakan Hutan Mangrove	Ya	25	100
		Tidak	0	0
		Ragu-Ragu	0	0
5	Penyebab Kerusakan Mangrove	Ya	25	100
		Tidak	0	0
		Ragu-Ragu	0	0
6	Penyebab hilangnya sumberdaya ekonomis di kawasan hutan mangrove	Ya	25	100
		Tidak	0	0
		Ragu-Ragu	0	0
7	Mengetahui fungsi dan peranan hutan mangrove	Ya	25	100

No	Tingkat Pengetahuan masyarakat tentang...	Jawaban	F	%
		Tidak	0	0
		Ragu-Ragu	0	0
		Ya	24	96
8	Cara/teknik pembibitan jenis mangrove	Tidak	1	4
		Ragu-Ragu	0	0
		Ya	24	96
9	Cara menanam mangrove	Tidak	1	4
		Ragu-Ragu	0	0
		Ya	22	88
10	Mengetahui maksud dari usaha rehabilitasi hutan mangrove	Tidak	2	8
		Ragu-Ragu	1	4

Secara umum masyarakat di lokasi penelitian mengetahui bahwa di sekitar pesisir pantai masih terdapat jenis-jenis mangrove yaitu jenis bakau (*Rhizophora* sp) dan api-api (*Avicennia* sp). Berdasarkan pengamatan, mangrove yang banyak tumbuh adalah jenis bakau (*Rhizophora* sp) dan api-api (*Avicennia* sp). Kedua jenis ini banyak dijumpai di sekitar saluran pembuangan tambak dan di pinggir-pinggir pantai yang tumbuh berkelompok-kelompok namun tidak membentuk suatu kawasan hutan yang lebat. Juga mereka mempunyai pengetahuan yang baik tentang karakteristik jenis-jenis mangrove.

Persepsi Terhadap Pengelolaan Hutan Mangrove

Sebagian besar responden menyatakan bahwa, pengelolaan sumberdaya hutan mangrove selama ini belum banyak melibatkan masyarakat pesisir khususnya pada tahap perencanaan maupun sampai tahap pemeliharaan dan mereka menginginkan agar dibentuk kelompok-kelompok tani/nelayan.

Di dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan mangrove responden menginginkan agar mereka dilibatkan. Pihak-pihak yang perlu berpartisipasi dalam pengelolaan sumberdaya hutan mangrove yaitu semua pihak yang berkepentingan baik masyarakat pesisir, masyarakat luar pesisir, aparat pemerintah, pengusaha, dan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM).

Frekwensi penyuluhan tentang pengelolaan sumberdaya hutan mangrove jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali, padahal penyuluhan sangat penting dilakukan karena

terkadang masyarakat dalam memanfaatkan hutan mangrove sebagai sumber pendapatan merusak ekosistem hutan mangrove. Responden menginginkan agar ada pihak-pihak dari instansi terkait apakah itu dari kelurahan, kecamatan atau dari dinas yang terkait memberikan penyuluhan.

Pendampingan dalam pengelolaan sumber daya hutan mangrove menurut responden juga sangat penting karena masyarakat dapat setiap saat bertanya tentang mengenai hal yang ia akan lakukan apakah tidak mengganggu atau merusak sumberdaya hutan mangrove, sekaligus pendamping tersebut memberikan arahan-arahan tentang pengelolaan sumberdaya hutan mangrove agar tetap berkelanjutan. Masyarakat juga menginginkan adanya penentuan zona-zona pengelolaan apakah sebagai kawasan konservasi, rehabilitasi, budidaya sehingga kawasan hutan mangrove dan sumberdayanya dapat terjaga dan lestari

Kepedulian responden terhadap pelestarian sumberdaya hutan mangrove cukup tinggi. Kenyataan ini dapat dilihat berdasarkan sebagian besar sikap responden akan menegur dan menasehati apabila melihat ada yang merusak mangrove dan sumberdayanya. Hal ini mereka lakukan karena mereka telah sadar bahwa dengan merusak hutan mangrove akan mengakibatkan ikan, udang, kepiting, maupun nener dan benur akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali sehingga sumber pendapatan tambahannya akan menurun. Namun ada juga responden yang diam, tidak menegur dan menasehati bila melihat tindakan yang merusak mangrove

Selain itu juga sebagian besar responden jika melihat ada yang melakukan penangkapan

ikan, udang dan kepiting dengan menggunakan obat bius maka ia akan menegur dan manasihati. Mereka berpendapat bahwa dengan menggunakan obat bius atau racun akan membunuh bibit ikan dan udang (nener/benur) dan merusak ekosistem mangrove. Namun ada juga yang diam bila melihat ada yang melakukan penangkapan dengan menggunakan obat bius atau racun

Kerusakan hutan mangrove dipesisir pantai Kabupaten Pinrang adalah umumnya disebabkan oleh konversi hutan mangrove menjadi lahan pertambakan dan diterjang oleh ombak yang besar. Hal ini telah menyebabkan perubahan fungsi hutan mangrove dan perubahan substrat di daerah pesisir pantai. Juga sebagai masyarakat menggunakannya sebagai kayu bakar dan kayu bangunan, serta ditebang untuk laluan dan tempat bersandar perahu

Kerusakan hutan mangrove telah menyebabkan hilangnya sumberdaya ekonomis disekitar hutan mangrove. Hal ini telah menyebabkan penurunan hasil tangkapan di daerah hutan mangrove

Masyarakat di sekitar kawasan hutan mangrove menganggap bahwa hutan mangrove mempunyai nilai ekonomis. Umumnya mereka melakukan penangkapan ikan, udang, kepiting, maupun nener dan benur. Sebagai dari hasil tangkapannya dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Keberadaan Hutan mangrove juga sangat dirasakan manfaatnya bila ditinjau dari aspek ekologis. Umumnya responden memberikan jawaban bahwa hutan mangrove juga berfungsi sebagai tempat memijah ikan, berkembang biak benih ikan dan udang serta menjaga keberadaan biota pantai. Fungsi lain dari hutan mangrove menurut responden adalah dapat mencegah terjadinya erosi pantai, pelindung dari angin kencang, dan mempercepat pembentukan daratan. Masyarakat di pesisir pantai juga berpendapat bahwa dengan keberadaan hutan mangrove maka akan menambah keindahan pemandangan, tempat rekreasi dan sebagai fungsi penghijauan (paru-paru dunia).

Partisipasi Terhadap Pengelolaan Hutan Mangrove

Model partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah keinginan masyarakat di sepanjang pesisir pantai Kecamatan Suppa secara aktif berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove mulai dari tahap

perencanaan pengawasan, sampai pada tahap pemeliharaan/pelestarian sumberdaya hutan mangrove

a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan mereka akan berpartisipasi dalam hal ide, gagasan maupun konsep yang seharusnya dilakukan. Merekalah yang tahu pasti tentang kondisi dan status kawasan hutan mangrove di sekitar mereka. Olehnya itu mereka sangat menginginkan agar ada wadah yang dapat menampung aspirasi mereka dalam bentuk kelompok-kelompok kerja atau kelompok-kelompok nelayan/petambak. Anggota dari kelompok mereka adalah yang tinggal disekitar kawasan hutan mangrove maupun yang memanfaatkan sumberdaya hutan mangrove

b. Pelaksanaan

Pada tahap ini responden bersedia berpartisipasi dalam penyediaan bibit bila dilakukan penanaman. Dalam hal ini mereka menginginkan agar pemerintah bersedia membeli bibit yang mereka semai dan diberi upah saat penanaman. Pada saat penanaman pemerintah bertindak sebagai fasilitator saja yaitu dengan menyediakan, fasilitas, kebutuhan-kebutuhan atau dana saat dilakukan penanaman. Masyarakat menginginkan agar dalam proses penanaman ini dikelola oleh kelompok-kelompok yang beranggotakan 10 – 15 orang. Masyarakat sangat mengharapkan dilibatkan dalam menentukan kawasan yang akan ditanami.

c. Pemeliharaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan umumnya responden menyatakan siap berpartisipasi dalam hal pemeliharaan dan pelestarian hutan mangrove. Bentuk partisipasi mereka yaitu bila dilakukan penanaman mangrove di kawasannya maka mereka akan bersedia melakukan penyulaman kembali bila ada mangrove yang mati atau terbawa arus dan membuang/membasmi bila ada hama-hama yang melakat pada anakan mangrove. Seperti halnya pada tahap pelaksanaan sebagian responden juga mengharapkan agar ada insentif dari pemerintah untuk biaya pemeliharaan.

d. Pengawasan/pelestarian

Pada tahap ini mereka menginginkan adanya sanksi yang diberikan berupa denda bagi

mereka yang merusak dan mencabut mangrove yang ditanam. Pemerintah dalam hal ini instansi yang terkait harus terlibat dalam pengawasan. Bila ada aparat atau pejabat yang melakukan pelanggaran misalnya dengan konversi lahan mangrove menjadi lahan bukidaya (tambak) dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka mereka juga harus menerima sanksi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan :

Tingkat pengetahuan dan dukungan masyarakat di pesisir pantai Kecamatan Suppa tentang pengelolaan hutan mangrove sangat baik. Masyarakat menginginkan agar dalam pengelolaan hutan mangrove semua pihak dilibatkan yaitu masyarakat yang terlibat langsung dalam memanfaatkan sumberdaya hutan mangrove, aparat pemerintah, pengusaha dan lembaga swadaya masyarakat

Model partisipasi yang diinginkan oleh masyarakat pesisir di Kecamatan Suppa adalah keterlibatan langsung mereka dalam pengelolaan hutan mangrove mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan/ pelestarian

DAFTAR PUSTAKA

- Amal. 2008. Model partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan mangrove di sepanjang pesisir pantai kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. *LaGeografia*. Volume VIII Nomor 2. ISSN : 1412-8187
- Arsyad, H.2000. *Persepsi Masyarakat dalam Rehabilitasi Masyarakat di Pesisir Pantai Kecamatan Suppa dan Cempa Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan*. Tesis. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Dahuri R, Rais J, Ginting SP, Sitepu MJ. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha.
- Parawansa, I. 2007. Pengembangan kebijakan pembangunan daerah dalam pengelolaan hutan mangrove di Teluk Jakarta secara berkelanjutan. Disertasi. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Rahardjo. 1996. *Community Based Management di Wilayah Pesisir*. Pelatihan Perencanaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. IPB. Bogor
- Rahardjo, D.Y dan Pradan U. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat. Wacana atau Pilihan?*. Dalam Sekapur Sirih Studi Kolaboratif FKKM, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Pustaka Kehutanan Masyarakat. Jakarta.
- Soetrisno, L. 1995. Menuju masyarakat partisipatif. Penerbit Kanisius. Yogyakarta